



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 27 Januari 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 17.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Program Kerja Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Tahun 2021. 2. Membahas mengenai <i>Roadmap</i> pembangunan jalan tol seluruh Indonesia termasuk rencana penyerahan 7 (tujuh) ruas tol ke swasta. 3. Membahas perubahan status jalan. 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada hari ini adalah membahas Program Kerja Ditjen Bina Marga dan dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Tahun 2021, Membahas mengenai *Roadmap* pembangunan jalan tol seluruh Indonesia termasuk rencana penyerahan 7 (tujuh) ruas tol ke swasta, Membahas perubahan status jalan, dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi dalam APBN TA 2020:

a.

Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan TA 2020	Realisasi Fisik TA 2020
Ditjen Bina Marga	97,52%	98,73%
Ditjen Bina Konstruksi	81,40%	93,74%

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Bina Marga atas capaian realisasi keuangan 97,52% dan realisasi fisik 98,73% dan mendorong Ditjen Bina Konstruksi untuk meningkatkan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021.

- b. Terhadap pendanaan program/kegiatan Ditjen Bina Marga di TA 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1,2 Triliun (2,48% dari pagu anggaran) dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp. 114 Milliar (18,6% dari pagu anggaran), Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini sehingga ke depannya tidak terulang kembali.
 - c. Terhadap dana sisa lelang agar penggunaannya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pelelangan barang dan jasa.
 3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Bina Marga untuk mengutamakan alokasi Program Padat Karya Tunai yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk melakukan penelitian umur jalan pasca konstruksi.
 5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk mengkoordinasikan dengan BPJT agar segera melakukan perbaikan kerusakan pada Jalan Tol yang sudah operasional dalam rangka meningkatkan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
 6. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi dalam melakukan lelang pengadaan barang dan jasa untuk selalu melakukan koordinasi dengan unit organisasi terkait dalam rangka mencermati *track record* peserta lelang.

7. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi untuk mengutamakan Penyedia Jasa Konstruksi lokal dalam program/kegiatan PUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan evaluasi terhadap proses lelang yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) agar pelaksanaannya menjadi lebih transparan dan akuntabel utamanya dengan mencermati nilai penawaran di bawah 80%, namun tidak memenuhi kesiapan peralatan dan material, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 27 Januari 2021

KETUA RAPAT,



L A S A R U S

DIRJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN PUPR,



HEDY RAHADIAN

DIRJEN BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR,



TRISASONGKO WIDIANTO